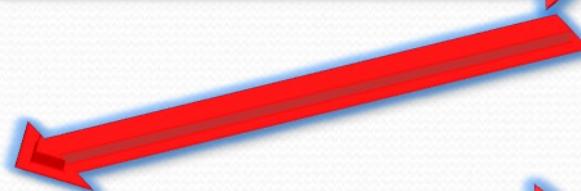


TEHNIK PEMERIKSAAN PERKARA

M. Rum Nessa

Staf Khusus Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI.
Bidang Yudisial

GUGATAN  **JAWABAN**

REPLIK   **DUPLIK**

PEMBUKTIAN

KESIMPULAN

PUTUSAN

I. GUGATAN

1. Mediasi

2. Gugatan Gugur

3. Pencabutan Gugatan

4. Perubahan Gugatan

5. Provisi (180 ayat 1) HIR

6. Komulasi

7. Asessoir

1. Mediasi

- a. Seluruh perkara melalui mediasi
- b. Hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak
- c. Usaha mendamaikan bukan hanya pada sidang pertama, tetapi dapat dilakukan setiap sidang (130 HIR/154 RBC).
- d. Khusus perceraian Hakim wajib mendamaikan kedua belah pihak dan suami isteri harus hadir



2. Gugatan Gugur (124 dan 126 HIR)

- 
- a. Penggugat tidak hadir pada sidang pertama
 - b. Penggugat telah dipanggil secara patut
 - c. Penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah
 - d. Tidak Ne Bis In Idem
(dapat memasukkan gugatan baru)
 - e. Sebelum diperiksa pokok perkara

3. Pencabutan Gugatan

(271 - 272 RV/HIR dan RBG tidak mengatur)

- a. Hak Penggugat**
- b. Sebelum pemeriksaan perkara**
- c. Persetujuan Tergugat apabila
Pemeriksaan sudah berlangsung**
- d. Pencabutan dilakukan dengan surat**
- e. Kalau sudah dipanggil, Tergugat harus
disampaikan pemberitahuan pencabutan**
- f. Harus ada penetapan pencabutan**



4. Perubahan Gugatan

(127 RV/HIR dan RBG tidak mengatur)

- a. Hak Penggugat**
- b. Sebelum pemeriksaan, tidak perlu persetujuan Tergugat**
- c. Setelah pemeriksaan harus persetujuan Tergugat dan Tergugat berhak menanggapi**
- d. Tidak menambah atau menyimpang dari kejadian materil
(tidak merubah posita dan petitum)**



5. Provisi (180 ayat 1) HIR

Permintaan menjatuhkan provisi
sebelum memeriksa pokok perkara.



Contoh :

- a. Ijin suami isteri
pisah tempat sementara
pasal 77. UU No.7/89.**
- b. Penghentian sementara pembangunan.**

6. Komulasi

- **Tujuan :**
 - a. Mewujudkan peradilan sederhana cepat dan biaya ringan.
 - b. Menghindari putusan yang saling bertentangan.
- **Bentuk :** a. Komulasi Subyektif.
b. Komulasi Obyektif.
- **Pengecualian :**
 - a. Pemilik obyek gugatan berbeda, Putusan MA-RI No. 201K/SIP/1972
 - b. Tunduk pada Hukum Acara yang berbeda, Putusan MA-RI No. 677/SIP/1972
 - c. Tunduk pada Kompetensi Absolut yang berbeda.

Catatan : Cerai dengan harta bersama,
(pasal 66 ayat 5 UU No.7/89)

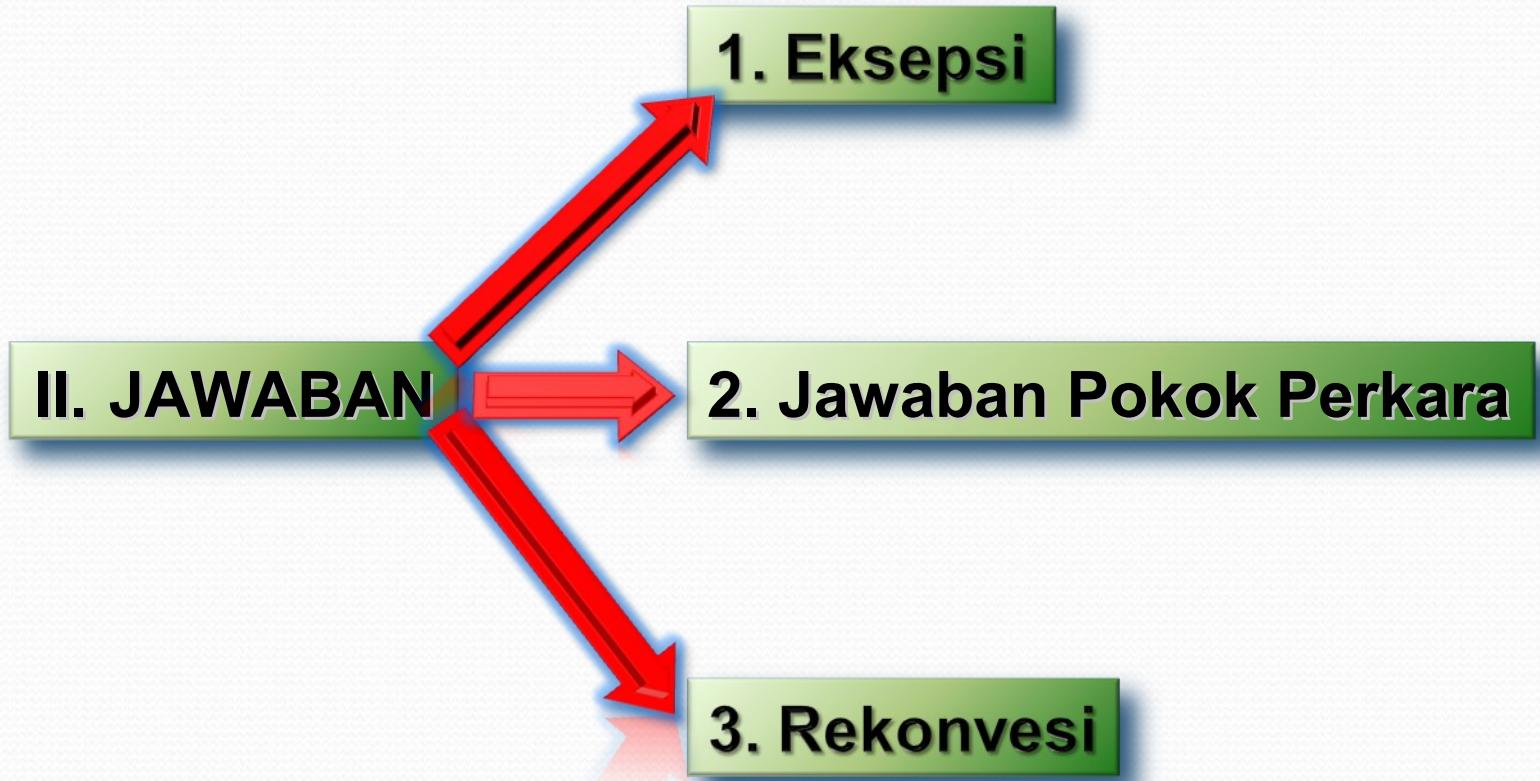
7. Asessoir

a. Murni :
Sita jaminan.



b. Tidak Murni :
Nafkah anak, nafkah isteri.

Syarat : - Satu kesatuan dengan
gugatan pokok.
- Saling mendukung tidak
boleh bertentangan.



1. Eksepsi

a. Kompetensi Relatif.

- Berdasarkan Wilayah Hukum.
- Pengadilan Agama mana yang berwenang.
- Diajukan pada sidang pertama bersama jawaban pokok perkara.
- Gugatan nafkah anak, nafkah isteri, penguasaan anak dan harta bersama, tunduk pada 118 HIR/142 Rbg atau pasal 73 UU 7/89.



b. Kompetensi Absolut.

- Pengadilan mana yang berwenang dari lingkungan pengadilan.
- Pasal 134 HIR, 132 RV :
 - a. Dapat diajukan tergugat setiap saat, sebelum putusan dijatuhkan.
 - b. Secara ex. Oficio Hakim harus menyatakan diri tidak berwenang.
 - c. Dapat diajukan pada tingkat Banding dan Kasasi

c. Prosesual : 1. Surat kuasa tidak sah.

- 2. Error In Persona.
- 3. Ne Bis In Idem.
- 4. Obscuur Libel.
- 5. Gugatan Prematur.

3. Rekonvesi

Tujuan :

-  **a. Menegakkan Asas Peradilan Sederhana**
- b. Menghemat biaya dan waktu**
- c. Menghindari putusan saling bertentangan**

Syarat-syarat :

-  **a. Gugatan Rekonvensi diformulasi secara tegas**
 - Merumuskan dengan jelas positif
 - menyebut dengan rinci petitem gugatan
- b. Tergugat Rekonvensi, terbatas pada Penggugat Konvensi**
- c. Diajukan bersama-sama dengan jawaban**
- d. Diajukan sebelum pembuktian**

Pengecualian :

- a. Dilarang gugatan Rekonvensi kepada diri orang yang bertindak berdasarkan suatu Kualitas
- b. Dilarang Gugatan Rekonversi diluar Yuridiksi Pengadilan yang memeriksa perkara
 - catatan : - Jual beli (kewenangan PN)
Rekonvensi
- Hibah (kewenangan PA)*
- c. Dilarang Gugatan Rekonvensi terhadap Verzet eksekusi
- d. Dilarang gugatan Rekonvensi pada Tingkat Banding



III. VERZET

Verzet terhadap Putusan Verstek.

Derden Verzet



Verzet terhadap Putusan Verstek.

1. Verzet terhadap Putusan Verstek.

a. Syarat-syarat Putusan Verstek :

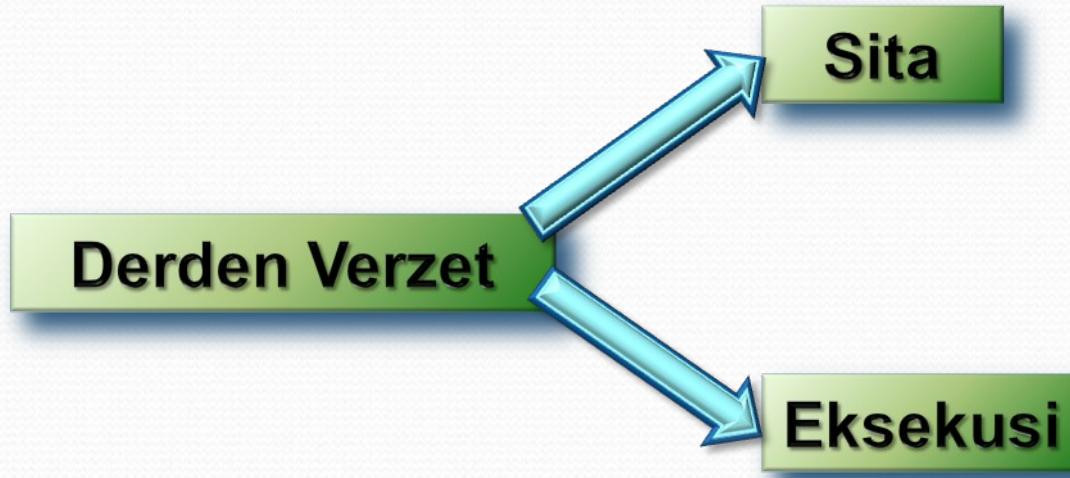
- 1. Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut**
- 2. Tidak hadir tanpa alasan yang sah**
- 3. Gugatan beralasan dan berdasarkan Hukum**
- 4. Apabila Tergugat mengajukan eksepsi pada permohonan Verzet :**
 - Wajib lebih dahulu memutus eksepsi**
 - Eksepsi dikabulkan pemeriksaan berhenti**
 - Eksepsi ditolak, dilanjutkan dengan acara pemeriksaan Putusan Verstek**



b. Penerapan acara Verstek tidak imperatif.

- Ketidakhadiran Tergugat pada sidang pertama dapat di putus Verstek**
- Mengundur sidang dan memanggil tergugat sekali lagi**

- 
- c. acara Verstek, tergugat lebih dari satu :**
 - Pada sidang pertama, semua tergugat tidak hadir (**verstek**)
 - Salah seorang tergugat tidak hadir, sidang wajib ditunda
 - Tetap tidak hadir pada sidang berikutnya pemeriksaan secara Kontradiktor

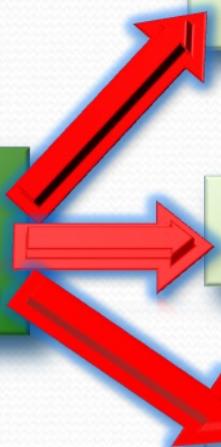


IV. INTERVENSI (70 RV dan 279 RV)

1. Voeging

2. Tussenkomst

3. Vrijwaring



1. Voeging

- 
- 1. Pihak ketiga bergabung kepada Penggugat atau Tergugat**
 - 2. Penggugat dan Tergugat menanggapi**
 - 3. Putusan sela :**
 - a. Tolak, lanjutkan pemeriksaan pokok perkara**
 - b. Kabul, disebutkan kedudukan pihak ketiga tersebut**

2. Tussenkomst

- 
1. Pihak ketiga bergabung karena ada kepentingan
 2. Tidak memihak kepada Penggugat atau Tergugat
 3. Putusan sela :
 - a. Tolak, banding bersama pokok perkara dan pemeriksaan perkara pokok dilanjutkan
 - b. Kabul, disebutkan kedudukan pihak ketiga tersebut
 - c. Dua perkara diperiksa bersama-sama

3. Vrijwaring

- 
- 1. Menarik pihak ketiga untuk bertanggung jawab**
 - 2. Membebaskan Tergugat dari tanggung jawab**
 - 3. Penggugat dan Tergugat menanggapi**
 - 4. Tolak : Putusan akhir, dapat dibanding bersama pokok perkara, perkara pokok di lanjutkan**
 - 4. Kabul : Putusan sela, perkara dilanjutkan**



Terimah Kasih